



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.011/2013

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2013;

18



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2013 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan dan/atau perbaikan kapal.

✍



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Tempat Penimbunan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp60.800.000.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.

4 k



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal oleh industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

✓ &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 397
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.011/2013
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU
PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU
PERBAIKAN KAPAL YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound</i>	<i>Epoxy metal compound, epoxy concrete compound, Grouting and chocking compound</i>	3214.10.00.00
2.	<i>Marine Growth Prevention</i>	<i>Rust preventatives and corrosion inhibitors</i>	3811.90.10.00
3.	<i>Charges for Fire Extinguisher</i>	<i>Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades</i>	3813.00.00.00
4.	<i>Adhesive resin and hardener</i>	<i>in the form of pastes</i>	3903.30.90.00
5.	<i>Polymeric Plastic</i>	<i>Polyvinyl Acetate in the form of liquids or pastes</i>	3905.19.10.00
6.	<i>Polyurethane Resin</i>	<i>Granules, powder, paste and liquid</i>	3909.50.00.00
7.	<i>Pipe</i>	<i>of Plastic for marine use</i>	3917.29.00.00
8.	<i>Fitting Pipe</i>	<i>of Plastic for marine use</i>	3917.40.00.00
9.	<i>Foam</i>	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) in the form of foam</i>	3921.12.00.00
10.	<i>Joiner, Bulkhead and Lining</i>	<i>Partition Connected of Plastic</i>	3926.90.99.00
		<i>Partition Connected of Aluminium</i>	7616.99.99.00
11.	<i>Carpet</i>	<i>Marine use, Fireproof</i>	4016.91.90.00
12.	<i>Accommodation Panel System</i>	<i>Made from PVC</i>	3918.10.90.00
		<i>Particle Boards</i>	4410.11.00.00
13.	<i>Rope</i>	<i>Polypropylene</i>	5607.49.00.00
		<i>Nylon</i>	5607.50.90.00
		<i>Manila</i>	5607.90.20.00
14.	<i>Curtain</i>	<i>Marine Use, Fireproof</i>	6303.92.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	<i>Life Jacket/Life Buoy</i>	<i>for Marine Use</i>	6307.20.00.00
16.	<i>Insulation</i>	<i>Mineral wool plate type rockwool or equal, polyurethane</i>	6806.10.00.00
17.	<i>Toilet System</i>	<i>Macerator toilet and vacuum toilet system, porcelain material</i>	6910.10.00.00
		<i>Macerator toilet and vacuum toilet system, Aluminium material</i>	6910.90.00.00
		<i>Stainless Steel</i>	7324.90.99.00
18.	<i>Tank Level Gauges/ Sight Glass/Level Glass</i>	<i>Measuring Glass</i>	7020.00.99.00
19.	<i>Grating</i>	<i>Fibre Glass (Fire-resistant)</i>	7020.00.99.00
20.	<i>Steel Ship Plate</i>	<i>Steel Grade A, B of thickness > 25 mm dan/atau thickness < 25 mm, width > 1,800 mm</i>	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00 7208.54.00.00
		<i>Steel Grade D, E, EH, AH of thickness > 10 mm dan/atau thickness < 10, width > 1,800 mm</i>	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00 7208.54.00.00
		<i>Steel Grade A, B, D, E, EH, AH of thickness < 6 mm, width > 1,800 mm</i>	7208.52.00.00 7208.53.00.00 7208.54.00.00
21.	<i>Corrugated Plate</i>	<i>Grade A baja bukan paduan dengan lebar kurang dari 600mm, bergelombang dengan karbon diatas 0,6%. tidak dilapisi, tidak disepuh, tidak dipalut</i>	7211.90.90.00
22.	<i>Steel Bar</i>	<i>Grade A (Forged Bar) Square Bar dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya</i>	7214.10.19.00

✓ &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Grade A (Forged Bar) Round Bar</i> dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	7214.10.21.00
		<i>Grade A (Forged Bar) Square Bar</i> dari baja bukan paduan dengan kandungan karbon lebih dari 0,6% menurut beratnya	7214.10.29.00
23.	<i>Steel Bar or Iron Bar</i>	<i>Grade A (Flat Bar)</i> dengan kandungan karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>	7215.50.10.00
		<i>Grade A (Flat Bar)</i> dengan kandungan karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>	7215.50.99.00
24.	<i>Bulb Flat</i>	<i>Grade A</i> dengan tinggi kurang dari 80 mm, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik, atau diekstrusi	7216.50.10.00
25.	<i>Bulb Flat</i>	<i>Grade A</i> dengan tinggi 80 mm atau lebih, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik, atau diekstrusi	7216.50.90.00
26.	<i>Stainless Steel Plate</i>	dengan lebar 600 mm atau lebih, dengan pola relief atau tanpa pola relief, tapi di perforasi /gelombang/dipoles	7219.90.00.00
27.	<i>Bar and Rod of Stainless Steel</i>	dengan penampang silang lingkaran, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas, atau diekstrusi	7222.11.00.00
		dengan penampang segiempat, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas, atau diekstrusi	7222.19.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	<i>Profile of Stainless Steel</i>	<i>Angle, shape and section not further worked than hot-rolled</i>	7222.40.10.00
29.	<i>Tubes and pipes</i>	<i>of cast iron with a connection</i>	7303.00.19.00
30.	<i>Hollow profiles of cast iron</i>	<i>with an external diameter not exceeding 100 mm</i>	7303.00.90.10
		<i>with an external diameter exceeding 100 mm</i>	7303.00.90.90
31.	<i>Seamless Pipe</i>	<i>Carbon Steel, High Pressure Pipe</i>	7304.39.20.00
		<i>Stainless Steel</i>	7304.49.00.00
		<i>Cooper Nickel</i>	7411.22.00.00
		<i>Alloy Steel</i>	7304.59.00.00
32.	<i>Hollow Profiles</i>	<i>Alloy Steel</i>	7304.51.90.00
33.	<i>Welded Pipes and Tubes</i>	<i>Stainless Steel, Longitudinally ERW</i>	7306.11.10.00
		<i>Carbon Steel, Longitudinally ERW</i>	7306.19.10.00
34.	<i>Other Bundy-weld Pipes and Tubes</i>	<i>other than Bundy-weld pipes and tubes with internal diameter < 12.5 mm</i>	7306.90.90.10
		<i>other than Bundy-weld pipes and tubes with internal diameter > 12.5 mm</i>	7306.90.90.90
35.	<i>Mooring Fitting</i>	<i>of Malleable Cast Iron</i>	7307.19.00.00
36.	<i>Stainless Pipe Fitting</i>	<i>Flanges with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.21.10.00
		<i>Flange with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.21.90.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.22.10.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.22.90.00

✓ &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.23.10.00
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.23.90.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.29.10.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.29.90.00
37.	<i>Carbon Steel Pipe Fitting</i>	<i>Flanges with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.91.10.00
		<i>Flange with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.91.90.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.92.10.00
		<i>Elbows, bends and sleeves with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.92.90.00
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.93.10.00
		<i>Butt welding fittings with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.93.90.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of less than 15 cm</i>	7307.99.10.00
		<i>Tees and Reducers with internal diameter of 15 cm or more</i>	7307.99.90.00
38.	<i>Oil Tank Hatches</i>	<i>other structure of iron or steel</i>	7308.90.99.00
39.	<i>Doors, Windows, Frame & accessories</i>	<i>Iron & Steel</i>	7308.30.00.00
		<i>Copper</i>	7419.99.90.10

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Aluminium</i>	7610.10.00.00
40.	<i>Gas Plant</i>	<i>Seamless Steel Cylinder ≥ 110L</i>	7311.00.29.00
41.	<i>Conveyor</i>	<i>Stainless Steel Nettingcoated with Fibreglass</i>	7314.49.00.00
42.	<i>Kenter schackle, swivel piece, chain stopper & tools for chain</i>	<i>of other than Mild Steel</i>	7315.90.90.00
		<i>of Cast Iron</i>	7325.99.90.00
43.	<i>Chain for Conveyor</i>	<i>of Stainless Steel</i>	7315.11.99.00
44.	<i>Anchor Chain</i>	<i>of Iron or Steel</i>	7315.20.00.00
45.	<i>Stud link chain</i>	<i>of other than mild Steel</i>	7315.81.00.00
46.	<i>Anchor</i>	<i>of Iron or Steel</i>	7316.00.00.00
47.	<i>Sinks, Wash Basins</i>	<i>of Stainless Steel</i>	7324.10.90.00
48.	<i>Bollard</i>	<i>of non-malleable cast Iron</i>	7325.10.90.90
49.	<i>Grating plate</i>	<i>Galvanized Steel</i>	7325.99.20.00
50.	<i>Stern Frame, Stern Bushing</i>	<i>Iron or Steel Casting</i>	7325.99.20.00
51.	<i>Ships Rudder</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.10.00
52.	<i>Rudder Stock & Fitting</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.99.90
53.	<i>Shafting for propulsion</i>	<i>of Iron, Steel and Stainless Steel</i>	7326.90.99.90
54.	<i>Ladder</i>	<i>Iron or Steel</i>	7326.90.99.90
		<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
55.	<i>Copper Sheets, Plates & Strip of thickness exceeding 0.15 mm</i>	<i>of refined copper in coils</i>	7409.11.00.00
		<i>of bronze in coils</i>	7409.31.00.00
		<i>of Cupro-nickel or Nickel-silver</i>	7409.40.00.00
56.	<i>Copper Pipes</i>	<i>Refined Copper</i>	7411.10.00.00
		<i>Bronze</i>	7411.29.00.00
57.	<i>Pipe Fitting</i>	<i>of refined copper</i>	7412.10.00.00

4 &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Copper alloys of copper-zinc base alloys (brass)</i>	7412.20.10.00
		<i>Copper alloys other than of copper-zinc base alloys (brass)</i>	7412.20.90.00
58.	<i>Bars & Rods of Aluminium Alloy</i>	<i>Extruded</i>	7604.29.10.00
		<i>non Extruded</i>	7604.29.90.00
59.	<i>Aluminium Alloy Sheets</i>	<i>with width exceeding 1 m</i>	7606.12.39.90
60.	<i>Aluminium Alloy</i>	<i>Plates, Strips and Coiled</i>	7606.12.90.00
61.	<i>Aluminium Non Alloy</i>	<i>Chequered Plate</i>	7606.91.00.00
62.	<i>Pipes / Tubes</i>	<i>Aluminium</i>	7608.10.00.00
		<i>Aluminium Alloys</i>	7608.20.00.00
63.	<i>Fitting Pipe</i>	<i>Aluminium</i>	7609.00.00.00
64.	<i>Furniture</i>	<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
65.	<i>Hatch Deck & Side Scuttless</i>	<i>Aluminium</i>	7610.90.90.00
66.	<i>Ship Ratchet Spanners</i>	<i>non-Adjustable</i>	8204.11.00.00
67.	<i>Multi Core Tube</i>	<i>of Iron or Steel</i>	8307.10.00.00
68.	<i>Ships Boilers & Economizer</i>	<i>Steam, Thermal Oil, for Marine Use</i>	8403.10.00.00
69.	<i>Parts of boiler</i>	<i>Bodies or shells</i>	8403.90.10.00
		<i>other than bodies or shells</i>	8403.90.90.00
70.	<i>Auxiliary Ships Boiler</i>	<i>Steam, Thermal Oil, for Marine Use</i>	8404.10.20.00
71.	<i>Diesel Engine for marine use</i>	<i>of a power exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW</i>	8408.10.90.10
72.	<i>Hand Pumps tidak dilengkapi alat ukur</i>	<i>Water Pump</i>	8413.20.10.00
		<i>other than Water Pumps</i>	8413.20.90.00
73.	<i>Pumps For Marine Use, Electrically Operated</i>	<i>Motor Driven Gear (Rotary), with a flow rate not exceeding 8,000 m³/h</i>	8413.60.30.10

48



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Motor Driven Centrifugal, with an inlet diameter not exceeding 200 mm</i>	8413.70.11.00
		<i>Motor Driven Screw, with a flow rate not exceeding 8,000 m³/h</i>	8413.81.11.10
74.	<i>Pumps For Marine Use, Non Electrically Operated</i>	<i>Diesel driven with inlet diameter exceeding 200 mm</i>	8413.70.49.00
75.	<i>Sewage Treatment Plant</i>	<i>for Marine Use</i>	8413.82.00.10
76.	<i>Ventilation Fan</i>	<i>for Marine Use</i>	8414.60.99.00
77.	<i>Ship Blower</i>	dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW	8414.59.30.00
		dengan kapasitas melebihi 125 kW	8414.59.50.00
78.	<i>Main Air Compressor / Emergency Air Compressor/ Air Compressor</i>	<i>Motor / Diesel Driven</i>	8414.80.49.00
79.	<i>Air Reservoir Tank</i>	<i>for Marine Use</i>	8414.90.32.00
80.	<i>Air Conditioning or Cooling System For Marine Use</i>	<i>Incorporating a Refrigerating Unit, of an output exceeding 26.38 kW</i>	8415.82.99.00
		<i>not Incorporating a Refrigerating Unit, of an output exceeding 26.38 kW</i>	8415.83.99.00
81.	<i>Waste Incenerator</i>	<i>for marine use, electrically operated</i>	8417.80.00.00
82.	<i>Electric Refrigerator</i>	<i>Marine Use, of Frequency 60 Hz Voltage 440 Volt, of frequency 50 Hz Voltage 380 Volt</i>	8418.10.90.00
83.	<i>Refrigerating Plant for Ship</i>	<i>Capacity exceeding 200L</i>	8418.50.19.00
		<i>Capacity not exceeding 200L</i>	8418.50.99.00
84.	<i>Water Heater for Ship</i>	<i>for Marine Use</i>	8419.19.90.00
85.	<i>Heat Exchanger Unit</i>	<i>other electrically operated</i>	8419.50.90.30

42



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
86.	<i>Drinking Water Fountain</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase & Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8419.89.19.00
87.	<i>Drinking Water UV Sterilizer</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase & Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8419.89.19.00
88.	<i>Dryer Machine</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 220V or 440V x 60Hz x 3 Phase; of capacity not exceeding 30 l</i>	8421.12.00.10
89.	<i>FW Generator / Reverse Osmosis / Water Maker</i>	<i>Capacity not exceeding 500 L/h</i>	8421.21.19.00
		<i>Capacity exceeding 500 L/h, Electrically Operated</i>	8421.21.22.00
90.	<i>Oil Filter, Oil Strainers, Sea Water & Oil Separator</i>	<i>for Marine Use</i>	8421.23.91.00
91.	<i>Oil & Fuel Purifier</i>	<i>for Marine Use</i>	8421.23.99.00
92.	<i>Fire Fighting Equipment</i>	<i>Portable fire extinguisher</i>	8424.10.90.00
93.	<i>Scanjet Tank Cleaning Machine</i>	<i>not electrically operated</i>	8424.89.90.00
94.	<i>Hand Chain Hoist</i>	<i>Chain block bushing type, for marine use</i>	8425.19.00.00
95.	<i>Mooring Winch / Windlass/ Winch</i>	<i>Hydraulic System</i>	8425.39.00.00
96.	<i>Crane for Ship Use, Crane for handling lifeboats, Davits</i>	<i>Overhead travelling cranes on fixed support</i>	8426.11.00.00
97.	<i>Crane for Ship Use</i>	<i>Pedestal jib cranes</i>	8426.30.00.00
98.	<i>Towing Hook Set</i>	<i>untuk penarik tongkang dengan kapasitas 5 - 30 ton</i>	8428.10.29.00

4 k



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
99.	<i>Washing Machine</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 220V or 440V x 60Hz x 3 Phase; Each of a dry linen capacity not exceeding 6 kg</i>	8450.11.10.00
100.	<i>Lathe</i>	<i>for Marine Use, electrically Operated</i>	8458.19.90.00
101.	<i>Drilling machine</i>	<i>Motor driven bench type, electrically operated</i>	8459.29.10.00
102.	<i>Grinder Machine</i>	<i>Electric driven, double wheel</i>	8460.29.10.00
103.	<i>Clear View Screen and Wiper</i>	<i>for Marine Use</i>	8479.89.30.00
104.	<i>Steering Gear Machine</i>	<i>Electrically operated</i>	8479.89.30.00
		<i>not electrically operated</i>	8479.89.40.00
105.	<i>Valve for Marine Use</i>	<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.10.11.00
		<i>Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter not exceeding 5cm and 40cm or more</i>	8481.10.19.00
		<i>Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.20.10.00
		<i>Water taps of copper or copper alloy, with an internal diameter of 2.5 cm or less</i>	8481.80.91.00
		<i>Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm</i>	8481.80.74.00

g l



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Water pipeline valves, manually operated gate valves with an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm</i>	8481.80.61.00
		<i>Water pipeline valves, Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more</i>	8481.80.62.00
		<i>other Water Pipeline Valves</i>	8481.80.63.00
		<i>having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm</i>	8481.80.73.00
106.	<i>Gear Box</i>	<i>of an output not exceeding 22.38 kW</i>	8483.40.20.00
107.	<i>Propeller, Bow Thruster & Stern Thruster</i>	<i>for Marine Use</i>	8487.10.00.00
108.	<i>Universal AC/DC motors</i>	dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 1 kW	8501.20.21.00
		dari jenis yang digunakan selain untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 1 kW	8501.20.29.00
109.	<i>Electric Motor Single Phase</i>	dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 1 kW	8501.40.21.00
		dari jenis yang digunakan selain untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 1 kW	8501.40.29.00

4 &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
110.	<i>Electric Motor Multi Phase</i>	dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran tidak melebihi 750 W	8501.51.11.00
		dari jenis yang digunakan selain untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran tidak melebihi 750 W	8501.51.19.00
		dari jenis yang digunakan untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 37,5 kW	8501.52.31.00
		dari jenis yang digunakan selain untuk barang dari pos 84.15, 84.18, 84.50, 85.09, atau 85.16 dengan keluaran melebihi 37,5 kW	8501.52.39.00
111.	<i>Hydraulic Power Pack</i>	<i>of an output between 1-37.5 kW</i>	8501.52.29.00
		<i>of an output exceeding 37.5 kW</i>	8501.52.39.00
112.	<i>Generator AC (alternator) for marine use</i>	<i>of an output not exceeding 12.5 kVA</i>	8501.61.10.00
		<i>of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA</i>	8501.61.20.00
		<i>of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA</i>	8501.62.10.00
		<i>of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA</i>	8501.62.90.00
		<i>of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA</i>	8501.63.00.00
		<i>of an output exceeding 750 kVA</i>	8501.64.00.00
113.	<i>Generating Set (Diesel Engine)</i>	<i>of an output not exceeding 125 kVA</i>	8502.12.10.00

4 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>of an output exceeding 125 kVA</i>	8502.12.20.00
		<i>output not exceeding 75 kVA</i>	8502.11.00.00
114.	<i>Transformator for Marine Use / Standard</i>	<i>Matching transformer, with power handling capacity not exceeding 10kVA</i>	8504.32.41.00
		<i>other matching transformer, with power handling capacity not exceeding 10kVA</i>	8504.32.49.00
		<i>Matching transformer, with power handling capacity exceeding 10kVA</i>	8504.32.51.00
		<i>other matching transformer, with power handling capacity exceeding 10kVA</i>	8504.32.59.00
115.	<i>Battery Storage</i>	<i>Lead Acid Battery (6 V atau 12 V, dengan kapasitas daya pengosongan-isi tidak melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan handle) kurang dari 13 cm; atau melebihi 23 cm, for Marine Use</i>	8507.20.92.00
116.	<i>Bulk Handling System</i>	<i>Pneumatic elevators and conveyors</i>	8428.20.90.00
117.	<i>Navigation Lighting</i>	<i>for Marine Use, unassembled</i>	8512.20.20.00
118.	<i>Gas Welder Set</i>	<i>with use gas Oxygen - Acetylene</i>	8515.29.00.00
119.	<i>Welder Set</i>	<i>Electric Arc Welder</i>	8515.39.10.00
120.	<i>Electric Cooking Range</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase & Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8516.60.90.00
121.	<i>Water Boiler (Water Kettle), Soup Boiler</i>	<i>Marine Use, Electrical Source: Main 440V x 60Hz x 3 Phase & Control 220V x 60Hz x 1 Phase</i>	8516.79.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
122.	<i>Sound recording or reproducing apparatus</i>	<i>for Marine Use</i>	8519.89.90.00
123.	<i>Radar</i>	<i>for Marine Use</i>	8526.10.10.00
124.	<i>Radio Communication / Navigational Aid apparatus</i>	<i>for Marine Use</i>	8526.91.10.00
125.	<i>Integrated Automation System & Control Monitoring System</i>	<i>Main Control</i>	8526.92.00.00
126.	<i>Fire Detection System</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.10.20.00
127.	<i>Smoke Detector System</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.10.30.00
128.	<i>Motor Sirens</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.10.90.00
129.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>for firefighting system</i>	8531.10.90.00
130.	<i>Foghorn & Air Whistle</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.80.19.00
131.	<i>Electric Bells & Horns</i>	<i>for Marine Use</i>	8531.80.19.00
132.	<i>Engine Telegraph</i>	<i>Telegraphy apparatus for ship engine room</i>	8531.80.90.00
133.	<i>Marine Lighting & Accessories</i>	<i>Searchlight</i>	9405.40.20.00
		<i>Fluorescent lamps and lighting fittings</i>	9405.10.40.00
		<i>Other fluorescent lamps and lighting fittings</i>	9405.10.90.00
134.	<i>Circuit Breaker and Switch Control</i>	<i>for a current of less than 16 A</i>	8536.20.91.00
135.	<i>Shore Connection Box</i>	<i>for a current of less than 16 A</i>	8536.90.22.00
		<i>for a current of exceeding 16 A</i>	8536.90.29.00
136.	<i>Switchboards, Control Panels & Distribution Boards</i>	<i>for voltage not exceeding 1,000 V</i>	8537.10.11.00
		<i>for voltage not exceeding 1,000 V, for use with goods of heading 84.71, 85.17 or 85.25</i>	8537.10.20.00

4 &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>for voltage not exceeding 1,000 V, for use with other goods of heading 84.71, 85.17 or 85.25</i>	8537.10.92.00
137.	<i>Crimp Terminal Boards and Switch Board for Marine Use</i>	<i>for voltage not exceeding 1,000 V</i>	8538.10.19.00
138.	<i>Remote Control Valve System</i>	<i>for Marine Use</i>	8543.70.20.00
139.	<i>Electric Cable and Other Miscellaneous Material</i>	<i>Insulated with plastics for a voltage exceeding 80V - 1000V</i>	8544.49.41.00
140.	<i>Rescue Boat, Life Boat</i>	<i>of a displacement not exceeding 30 t</i>	8906.90.10.00
141.	<i>Inflatable Life Raft</i>	<i>for Marine Use</i>	8907.10.00.00
142.	<i>Binocular</i>	<i>for Marine Use</i>	9005.10.00.00
143.	<i>Monocular</i>	<i>for Marine Use</i>	9005.80.90.00
144.	<i>Compasses</i>	<i>for Marine Use</i>	9014.10.00.00
145.	<i>Echo Sounder, Speed Log, Auto Pilot, Fish Finder, Sextant & Clinometers</i>	<i>Instrument & Navigation Equipment for Marine Use</i>	9014.80.10.00
146.	<i>Transducer</i>	<i>for Marine Use</i>	9014.90.10.00
147.	<i>Anemometer</i>	<i>for Marine Use</i>	9015.80.90.00
148.	<i>Emergency Escape Breathing Device</i>	<i>for Marine Use</i>	9020.00.00.00
149.	<i>Marine Thermometer and Temperature Control System</i>	<i>Liquid filled, for direct reading</i>	9025.11.00.00
		<i>Electrically Operated</i>	9025.19.19.00
150.	<i>Barometer</i>	<i>Electrically Operated</i>	9025.80.20.00
151.	<i>Flow Meter, Level Gauge</i>	<i>for marine use, electrically operated</i>	9026.10.30.00
152.	<i>Pressure Gauge</i>	<i>for marine use, electrically operated</i>	9026.20.30.00
153.	<i>Fixed Gas Detection System</i>	<i>for Gas Leaking</i>	9027.10.10.00

48



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
154.	<i>Rudder Angle Indicator</i>	<i>for Marine Use</i>	9031.80.90.00
155.	<i>Ship Cargo Tank System</i>	<i>Hydraulic or Pneumatic</i>	9032.81.00.00
156.	<i>Oil Discharge Monitor (ODM)</i>	<i>for Marine Use</i>	9032.89.10.00
157.	<i>Loading Computer</i>	<i>for Marine Use</i>	9032.89.10.00
158.	<i>Ship Alarm, Control & Monitoring System</i>	<i>for Marine Use</i>	9032.89.39.00
159.	<i>Impressed Current Catodic Protection</i>	<i>Electrically Cathodic</i>	9032.89.90.00
160.	<i>Pilot Chair</i>	<i>Seats for marine use with metal frames</i>	9401.80.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO